



## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [setjen@kkp.go.id](mailto:setjen@kkp.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO HUKUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Effin Martiana**

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal

Pihak Kesatu,  
Kepala Biro Hukum

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Effin Martiana

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**BIRO HUKUM**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP	1.	Indeks Reformasi Hukum KKP (Indeks)	80
		2.	Indeks Kualitas Kebijakan KKP (Indeks)	65
		3.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	100
		4.	Permasalahan Hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
		5.	Permasalahan Hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Ditangani (%)	100
		6.	Perjanjian Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Siap untuk Ditandatangani (%)	100
		7.	Instrumen Hukum Internasional Bidang Kelautan dan Perikanan yang Diberikan Pertimbangan Hukum (%)	100
		8.	Nilai Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Kelautan dan Perikanan (Nilai)	92
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum	9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hukum (Nilai)	84
		10.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Biro Hukum (Indeks)	85
		11.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Biro Hukum (%)	100
		12.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Lingkungan Biro Hukum (%)	94
		13.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Hukum (%)	95
		14.	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum (%)	95
		15.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP (%)	100
		16.	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi lingkup Biro Hukum (Nilai)	75

### Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	<b>Legislasi, Litigasi, dan Kerja sama</b>	
	Layanan Hukum	Rp8.835.000.000
	Layanan Bantuan Hukum	Rp2.165.000.000
2.	<b>Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum</b>	
	Layanan Umum	Rp4.500.000.000
	Layanan Perkantoran	Rp2.276.400.000
<b>Total Anggaran Biro Hukum Tahun 2024</b>		<b>Rp17.276.400.000</b>

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal



Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Kesatu,  
Kepala Biro Hukum



Effin Martiana